



## Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Lamatti Rilau Kecamatan Sinjai Utara

Syamsiah Hasyim<sup>1\*</sup>, Septi Hikmatun<sup>2</sup>, Khairul Insan<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup>Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sinjai, Indonesia

Email: [syamsiah.hasyim@gmail.com](mailto:syamsiah.hasyim@gmail.com)<sup>1</sup>, [septihikmatun@gmail.com](mailto:septihikmatun@gmail.com)<sup>2</sup>, [khairulinsan46@gmail.com](mailto:khairulinsan46@gmail.com)<sup>3</sup>

\*Penulis Korespondensi: [syamsiah.hasyim@gmail.com](mailto:syamsiah.hasyim@gmail.com)

**Abstract.** This study aims to analyze the implementation of the Non-Cash Food Assistance Program (BPNT) policy in Lamatti Rilau Village, North Sinjai District, using George C. Edwards III's policy implementation model encompassing four variables: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The study employed a descriptive qualitative approach with data collected through in-depth interviews, field observations, and documentation studies. Informants consisted of representatives from the Sinjai District Social Office, the Village Head, TKSK social workers, BPNT village operators, and four beneficiary families (KPM). Results show that BPNT implementation has been effective, supported by integrated communication through structural (RT/RW) and digital (WhatsApp) channels, adequate and qualified human resources, positive implementer disposition, and well-coordinated bureaucratic structure. Targeting accuracy, adaptive distribution mechanisms, food quality, monitoring and evaluation all showed satisfactory results. Supporting factors include strong local government commitment, active community participation, and solid inter-stakeholder coordination. The main obstacle—limited technology access among elderly KPM—was overcome by strengthening RT/RW roles, community leaders, and village communication optimization. This research contributes to studies of public policy implementation of social assistance programs at the village level.

**Keywords:** BPNT; Edwards III; Policy Implementation; Social Assistance; Social Protection.

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Lamatti Rilau Kecamatan Sinjai Utara menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edwards III yang mencakup empat variabel: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Informan terdiri dari unsur Dinas Sosial Kabupaten Sinjai, Lurah Lamatti Rilau, pendamping TKSK, operator BPNT kelurahan, dan empat Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi BPNT berjalan efektif dengan komunikasi terintegrasi melalui jalur struktural (RT/RW) dan digital (WhatsApp), sumber daya manusia yang memadai dan berkualifikasi, disposisi positif para pelaksana, serta struktur birokrasi yang terkoordinasi dengan baik. Aspek ketepatan sasaran, mekanisme penyaluran adaptif, kualitas bahan pangan, monitoring dan evaluasi menunjukkan hasil memuaskan. Faktor pendukung meliputi komitmen pemerintah daerah, partisipasi aktif masyarakat, dan koordinasi antar-stakeholder yang solid. Hambatan utama berupa keterbatasan akses teknologi pada KPM lansia diatasi melalui penguatan peran RT/RW, tokoh masyarakat, dan optimalisasi media komunikasi kelurahan. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian implementasi kebijakan publik program bantuan sosial di tingkat kelurahan.

**Kata Kunci:** BPNT; Edwards III; Implementasi Kebijakan; Perlindungan Sosial; Program Bantuan Sosial.

### 1. PENDAHULUAN

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan program perlindungan sosial pemerintah Indonesia yang dikembangkan sebagai transformasi dari Program Raskin/Rastra. Sejak diimplementasikan pada tahun 2017, BPNT menyalurkan bantuan sosial secara non-tunai kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulan melalui akun elektronik yang digunakan untuk membeli bahan pangan di e-warong yang bekerja sama dengan bank penyalur (Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, 2020).

Transformasi ini merupakan bagian dari agenda besar digitalisasi bantuan sosial guna mengurangi kebocoran, meningkatkan transparansi, dan mendorong inklusi keuangan masyarakat miskin. Dasar hukum pelaksanaan BPNT adalah Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai dan Peraturan Menteri Sosial No. 20 Tahun 2019. Program ini bertujuan mengurangi beban pengeluaran KPM, memberikan nutrisi seimbang, meningkatkan ketepatan sasaran, serta mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs) (Kementerian Lintas Sektor, 2017). Nilai bantuan yang diterima KPM adalah Rp 200.000 per bulan, yang dapat digunakan untuk membeli beras dan telur di e-warong yang telah ditunjuk.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi BPNT di berbagai daerah masih menghadapi permasalahan seperti ketidaktepatan sasaran, keterbatasan e-warong, minimnya sosialisasi, serta lemahnya koordinasi pelaksana (Yunus, 2019; Rachman et al., 2018; Kawung et al., 2020; Nirmawati et al., 2025). Mulyadi (2019) menemukan bahwa di Kota Sukabumi, tujuan kebijakan belum tercapai akibat keterbatasan SDM dan minimnya komunikasi antar dinas. Sebaliknya, Syamsuddin dan Jusniaty (2021) menemukan implementasi yang berjalan baik di Kelurahan Samaenre Sinjai Tengah ketika didukung komitmen pemerintah daerah dan koordinasi yang kuat. Perbedaan hasil ini mengindikasikan bahwa konteks lokal memainkan peran penting dalam keberhasilan implementasi BPNT.

Di Kelurahan Lamatti Rilau Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, program BPNT melayani 139 KPM pada tahun 2021, meningkat menjadi 141 KPM pada tahun 2023–2024, dan mengalami penyesuaian menjadi 135 KPM pada tahun 2025 setelah proses validasi ulang. Kabupaten Sinjai memiliki tingkat kemiskinan 8,2% dengan 21.390 jiwa penduduk miskin (BPS Kabupaten Sinjai, 2024), menjadikan program BPNT sangat relevan sebagai instrumen penanggulangan kemiskinan lokal. Observasi awal mengidentifikasi tantangan aksesibilitas teknologi khususnya pada kelompok lansia sebagai hambatan tersendiri. Penelitian ini bertujuan: (1) menganalisis implementasi kebijakan BPNT di Kelurahan Lamatti Rilau melalui model Edwards III; (2) mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat; serta (3) mendeskripsikan upaya pemerintah dalam mengatasi hambatan.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **Konsep Kebijakan Publik**

Kebijakan publik menurut Thomas R. Dye (dalam Aziz & Humaizi, 2013) adalah "whatever governments choose to do or not to do", yakni setiap pilihan tindakan maupun keputusan untuk tidak bertindak yang dilakukan oleh pemerintah.

Definisi ini menekankan bahwa diam atau tidak bertindak pun merupakan bentuk kebijakan yang memiliki konsekuensi bagi masyarakat. William Jenkins (dalam Nurfurqon, 2020) mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian keputusan yang saling terkait yang diambil oleh aktor politik dalam rangka mencapai tujuan tertentu berdasarkan situasi yang ada. Sementara James Anderson (dalam Sholih Muadi et al., 2016) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu.

Karakteristik kebijakan publik mencakup: berorientasi pada tujuan, melibatkan pola tindakan pemerintah yang terorganisir, bersifat positif (pemerintah melakukan sesuatu) maupun negatif (pemerintah melarang sesuatu), serta selalu didasarkan pada hukum dan kewenangan yang sah. Kebijakan publik dalam konteks program bantuan sosial seperti BPNT merupakan wujud konkret peran negara dalam menjamin pemenuhan kebutuhan dasar warganya yang paling rentan.

### **Tahap-Tahap Kebijakan Publik**

Proses kebijakan publik berlangsung dalam beberapa tahap yang saling berkesinambungan. William Dunn (2003) membagi proses tersebut menjadi: penyusunan agenda (agenda setting), formulasi kebijakan (policy formulation), adopsi kebijakan (policy adoption), implementasi kebijakan (policy implementation), dan evaluasi kebijakan (policy evaluation). Di antara semua tahap tersebut, implementasi merupakan tahap yang paling kritis karena menentukan apakah sebuah kebijakan yang baik di atas kertas dapat benar-benar mewujudkan perubahan di lapangan (Pramono, 2020).

Kegagalan implementasi kebijakan (implementation failure) sering kali tidak disebabkan oleh buruknya desain kebijakan, melainkan oleh lemahnya kapasitas kelembagaan, komunikasi yang tidak efektif, dan kurangnya komitmen pelaksana di lapangan. Hal ini menjadikan studi implementasi kebijakan relevan dan penting, terutama untuk program-program sosial yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat miskin.

### **Teori Implementasi Kebijakan: Model George C. Edwards III**

Model implementasi kebijakan yang paling banyak digunakan dalam kajian program bantuan sosial di Indonesia adalah model George C. Edwards III (1980) (dalam Pramono, 2020). Model ini menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yang saling berinteraksi satu sama lain: Pertama, Komunikasi. Keberhasilan implementasi mensyaratkan para implementor mengetahui dengan tepat apa yang harus mereka lakukan. Tujuan dan sasaran kebijakan harus dikomunikasikan secara jelas, konsisten, dan akurat kepada semua pihak yang terlibat.

Terdapat tiga dimensi dalam komunikasi implementasi: transmisi (penyaluran informasi), kejelasan (clarity), dan konsistensi (consistency). Komunikasi yang buruk akan menghasilkan distorsi implementasi yang menghambat ketercapaian tujuan.

Kedua, Sumber Daya. Meskipun kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas, implementasi tidak akan berjalan efektif jika para pelaksana kekurangan sumber daya. Sumber daya mencakup: sumber daya manusia (kompetensi dan jumlah implementor yang memadai), sumber daya finansial (anggaran yang cukup), sumber daya teknologi (sistem informasi dan infrastruktur pendukung), serta sumber daya informasi (data yang akurat dan panduan teknis yang jelas).

Ketiga, Disposisi. Disposisi adalah watak, sikap, dan komitmen para pelaksana dalam menjalankan kebijakan. Apabila para implementor memiliki disposisi positif (mendukung kebijakan), maka mereka akan cenderung menjalankannya sesuai kehendak pembuat kebijakan. Sebaliknya, disposisi yang negatif dapat menyebabkan sabotase halus terhadap implementasi. Disposisi dipengaruhi oleh faktor insentif, seleksi pelaksana, dan budaya organisasi.

Keempat, Struktur Birokrasi. Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan implementasi. Dua aspek terpenting dalam struktur birokrasi adalah: (a) Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menjadi panduan baku bagi pelaksana dalam menjalankan tugas sehari-hari; dan (b) fragmentasi, yaitu dispersi tanggung jawab pada berbagai unit yang membutuhkan koordinasi lintas sektoral. Struktur birokrasi yang terlalu kaku dan berbelit dapat menghambat implementasi, sementara struktur yang terlalu longgar dapat menyebabkan ketidakkonsistenan.

Keempat variabel ini bukan sekadar faktor independen, melainkan berinteraksi secara dinamis—kekuatan di satu variabel dapat mengkompensasi kelemahan di variabel lain, dan sebaliknya.

### **Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)**

BPNT adalah bantuan sosial pangan non-tunai yang diberikan kepada KPM setiap bulan senilai Rp 200.000 melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang digunakan untuk membeli beras dan telur di e-warong mitra Bank HIMBARA (Kementerian Lintas Sektor, 2017). Kepesertaan didasarkan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan kriteria: keluarga miskin/rentan miskin, terdaftar dalam DTKS, berasal dari kelompok prioritas (lansia, disabilitas, ibu hamil, keluarga dengan anak usia sekolah), dan memiliki KKS.

Program ini dirancang dengan beberapa keunggulan dibanding program pendahulunya (Raskin/Rastra): (1) mekanisme non-tunai yang meminimalisir kebocoran dan manipulasi distribusi; (2) pemberian pilihan kepada KPM untuk menentukan sendiri kapan dan seberapa banyak berbelanja dalam batas nilai bantuan; (3) mendorong inklusi keuangan masyarakat miskin melalui kepemilikan rekening bank; dan (4) mendukung pengembangan ekosistem ekonomi lokal melalui e-warong. Namun demikian, transformasi digital ini juga membawa tantangan baru bagi kelompok penerima yang tidak melek teknologi, terutama lansia (Purba et al., 2025).

### **Penelitian Terdahulu**

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji implementasi BPNT dari berbagai perspektif dan lokasi. Yunus (2019) menemukan bahwa di Kota Probolinggo, program BPNT belum optimal akibat gangguan mesin EDC, minimnya sosialisasi, dan ketidaksesuaian data DTKS. Rachman et al. (2018) menemukan permasalahan serupa di Kota Makassar berupa ketidaktepatan sasaran dan keterbatasan e-warong. Kawung et al. (2020) di Kota Manado mengidentifikasi buruknya kualitas bahan pangan dan lemahnya pengawasan sebagai masalah utama. Fauzi et al. (2023) di Kabupaten Situbondo menemukan rendahnya pemahaman KPM dan ketidakteraturan penyaluran, meski lokasi e-warong yang strategis dan antusiasme masyarakat menjadi faktor pendukung.

Sebaliknya, Syamsuddin dan Jusniaty (2021) menemukan bahwa implementasi BPNT di Kelurahan Samaenre Sinjai Tengah berjalan baik dengan ketercapaian target dari segi jumlah, kualitas, dan aspek administratif. Farid Yusuf Nur Achmad (2023) menyimpulkan bahwa BPNT cukup efektif dalam menurunkan pengeluaran pangan meski masih perlu perbaikan dalam distribusi dan sosialisasi. Nirmawati et al. (2025) menemukan bahwa di Kabupaten Hulu Sungai Utara, penerapan SOP yang konsisten menjadi faktor penyelamat meski koordinasi dan sosialisasi masih lemah. Persamaan penelitian ini dengan literatur terdahulu terletak pada pendekatan kualitatif deskriptif dan fokus pada faktor pendukung-penghambat. Keunikannya adalah pada analisis upaya pemerintah mengatasi hambatan dalam konteks lokal Kelurahan Lamatti Rilau yang belum banyak diteliti.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif menurut Creswell (2014) (dalam Assa & Dachi, 2023) merupakan pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.

Pendekatan ini dipilih karena peneliti ingin memperoleh pemahaman mendalam mengenai proses, konteks, dan dinamika implementasi BPNT di tingkat kelurahan—hal yang tidak dapat dicapai hanya dengan data kuantitatif. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat (Neuman, 2014, dalam Zellatifanny & Mudjiyanto, 2018).

Penelitian dilaksanakan di Kelurahan Lamatti Rilau, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan, selama dua bulan (Juli–Agustus 2025). Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa Kelurahan Lamatti Rilau memiliki konsentrasi penduduk miskin yang signifikan dan merupakan salah satu target utama program BPNT di Kabupaten Sinjai. Informan penelitian dipilih secara purposive, terdiri dari: (1) Pengolah Data Kabupaten Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial yang mewakili Kepala Dinas Sosial; (2) Lurah Lamatti Rilau; (3) Pendamping Sosial TKSK Kecamatan Sinjai Utara; (4) Operator BPNT Kelurahan; serta (5) empat Keluarga Penerima Manfaat dari masing-masing lingkungan (Polewali, Onrong Datu, Leppakomai, dan Cenning).

Teknik pengumpulan data meliputi: (a) wawancara mendalam (in-depth interview) dengan panduan wawancara semi-terstruktur; (b) observasi lapangan terhadap proses penyaluran bantuan, kondisi e-warong, dan aktivitas KPM; serta (c) studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan, data KPM, laporan penyaluran, SK TKSK, dan screenshot media komunikasi. Analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana (2014) melalui tahapan: pengumpulan data, reduksi data (memilah dan meringkas informasi relevan), penyajian data (menyusun pola hubungan antar data), dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber (membandingkan data dari berbagai informan) dan triangulasi metode (membandingkan hasil wawancara dengan observasi dan dokumentasi).

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Kelurahan Lamatti Rilau merupakan satu dari enam kelurahan di Kecamatan Sinjai Utara dengan luas wilayah 7,02 km<sup>2</sup> (23,7% dari total luas kecamatan) dan jumlah penduduk 2.596 jiwa yang terbagi dalam empat lingkungan: Polewali (610 jiwa, 182 KK), Onrong Datu (666 jiwa, 199 KK), Leppakomai (741 jiwa, 221 KK), dan Cenning (579 jiwa, 174 KK). Rasio jenis kelamin menunjukkan perempuan sedikit lebih banyak (51,48%) dibanding laki-laki (48,52%), dengan rata-rata 3 jiwa per kepala keluarga.

Kelurahan ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Bone di sebelah utara, menjadikannya gerbang strategis menuju Kabupaten Sinjai. Mata pencaharian utama penduduk adalah pertanian, diikuti perdagangan, peternakan, dan sektor informal. Kondisi sosial ekonomi yang beragam, dikombinasikan dengan tingkat kemiskinan Kabupaten Sinjai sebesar 8,2% (21.390 jiwa) (BPS Kabupaten Sinjai, 2024), menjadikan Kelurahan Lamatti Rilau sebagai lokasi strategis untuk implementasi program perlindungan sosial. Perkembangan jumlah penerima BPNT selama 2021–2025 disajikan pada Tabel 1.

**Tabel 1.** Perkembangan Jumlah Penerima BPNT Kelurahan Lamatti Rilau (2021–2025).

| No. | Tahun | Jumlah Penerima (KPM) |
|-----|-------|-----------------------|
| 1   | 2021  | 139                   |
| 2   | 2022  | 140                   |
| 3   | 2023  | 141                   |
| 4   | 2024  | 141                   |
| 5   | 2025  | 135                   |

Tabel 1 menunjukkan tren yang relatif stabil dengan penambahan kecil dari 139 KPM (2021) menjadi 141 KPM (2023–2024), kemudian mengalami koreksi ke 135 KPM pada 2025 akibat proses validasi ulang data oleh Kementerian Sosial melalui sistem SIKS-NG. Penurunan ini bukan indikasi kegagalan program, melainkan bukti akurasi data yang semakin baik.

### **Implementasi BPNT Berdasarkan Model Edwards III**

#### ***Komunikasi***

Komunikasi merupakan variabel pertama dan paling fundamental dalam model Edwards III. Dalam implementasi BPNT di Kelurahan Lamatti Rilau, komunikasi berlangsung melalui dua jalur yang saling melengkapi. Jalur struktural memanfaatkan hierarki pemerintahan: Dinas Sosial Kabupaten → Kelurahan → RT/RW → KPM. Jalur digital memanfaatkan grup WhatsApp kelurahan dan aparat untuk distribusi informasi yang lebih cepat. Lurah Lamatti Rilau, Bapak Andi Agus Gunawang, S.Sos., menyatakan: *"Setiap informasi yang kami terima dari Dinas Sosial Kabupaten, selalu kami teruskan ke masyarakat penerima. Biasanya informasi itu kami sampaikan lewat aparat RT/RW dan juga melalui grup WhatsApp Kelurahan agar semua penerima manfaat bisa mengetahui jadwal penyaluran maupun aturan baru yang berlaku."* (Wawancara, 10 Juli 2025)

Operator BPNT Kelurahan, Bapak Awaluddin, S.IP., M.M., membenarkan alur informasi tersebut dan menambahkan bahwa undangan tertulis juga disebarakan melalui RT/RW sebagai konfirmasi resmi kepada KPM.

Keberadaan grup WhatsApp khusus Banpang Kabupaten Sinjai yang melibatkan Dinas Sosial dan seluruh operator kelurahan memungkinkan diseminasi informasi teknis secara real-time, mengurangi keterlambatan yang sering terjadi pada saluran konvensional.

Kendala yang ditemukan adalah sebagian KPM lanjut usia tidak memiliki atau tidak mampu mengoperasikan smartphone, sehingga bergantung sepenuhnya pada informasi lisan dari RT/RW. Hal ini menciptakan ketergantungan pada keaktifan RT/RW sebagai mata rantai komunikasi terakhir. Temuan ini sejalan dengan Nirmawati et al. (2025) yang mengidentifikasi keterbatasan akses informasi kelompok rentan sebagai hambatan universal dalam implementasi BPNT. Secara keseluruhan, dengan mempertimbangkan kedua jalur komunikasi yang saling menguatkan, dimensi komunikasi dinilai cukup efektif dalam memastikan pesan kebijakan tersampaikan secara konsisten dari tingkat kabupaten hingga KPM.

### **Sumber Daya**

Sumber daya manusia yang menangani BPNT di Kelurahan Lamatti Rilau terdiri dari dua personel inti sebagaimana disajikan pada Tabel 2.

**Tabel 2.** Struktur SDM Pengelola BPNT Kelurahan Lamatti Rilau.

| No | Nama                          | Posisi                                   | Kualifikasi              | Status                                |
|----|-------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| 1  | Awaluddin, S.IP.,<br>M.M      | Operator BPNT Kelurahan<br>Lamatti Rilau | S2 Magister<br>Manajemen | Tentatif                              |
| 2  | Muh. Hasal<br>Suchiharto, S.M | Pendamping Sosial TKSK<br>Sinjai Utara   | S1 Manajemen             | SK Dirjen No.<br>6/5/SK/HK.01/01/2024 |

Pengolah Data Kabupaten Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial, Bapak Muhibbuddin, S.E., menegaskan bahwa SDM pengelola BPNT di Kabupaten Sinjai umumnya memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai, telah melalui proses seleksi ketat, dan dibekali pelatihan teknis dari provinsi. Kompetensi mereka terus ditingkatkan melalui bimbingan teknis berkala dan evaluasi rutin, mencakup penguasaan pengelolaan data SIKS-NG, administrasi program, dan koordinasi lapangan.

Meskipun jumlah SDM tergolong minimal (hanya dua personel untuk 135 KPM dari empat lingkungan), kinerja mereka dinilai memadai karena didukung oleh struktur koordinasi yang baik dengan aparat kelurahan dan RT/RW. Kondisi ini berbeda dengan temuan Mulyadi (2019) di Sukabumi yang menemukan keterbatasan SDM sebagai penghambat utama, dan lebih mendekati kondisi yang ditemukan Syamsuddin dan Jusniaty (2021) di Sinjai Tengah di mana SDM yang kompeten menjadi kunci keberhasilan program. Sumber daya finansial berupa anggaran program BPNT sepenuhnya bersumber dari APBN melalui Kementerian Sosial, sehingga ketersediaannya tidak bergantung pada kapasitas fiskal daerah.



### **Disposisi**

Disposisi para pelaksana BPNT di Kelurahan Lamatti Rilau menunjukkan sikap yang sangat positif dan komitmen yang tinggi. Lurah Lamatti Rilau menyatakan bahwa pihak kelurahan memahami betapa pentingnya program BPNT bagi masyarakat kurang mampu, sehingga selalu aktif dalam setiap tahapan dari pendataan hingga pengawasan penyaluran. Dukungan penuh juga diberikan oleh RT/RW yang secara proaktif membantu menyebarkan informasi dan mengawal proses penyaluran di wilayahnya masing-masing.

Pendamping TKSK Sinjai Utara, Bapak Muh. Hasal Suchiharto, S.M., mengungkapkan: *"Saya mendampingi langsung penerima manfaat setiap penyaluran. Walaupun jumlah penerima cukup banyak, tugas ini kami jalankan karena memang program ini sangat membantu masyarakat. Kami juga rutin berkoordinasi dengan pihak kelurahan supaya tidak ada penerima yang terlewat."* (Wawancara, 10 Juli 2025)

Komitmen yang tinggi dari para pelaksana ini relevan dengan konsep Edwards III yang menyatakan bahwa disposisi positif akan mendorong implementor menjalankan kebijakan sesuai kehendak pembuat kebijakan. Temuan ini juga selaras dengan Fauzi et al. (2023) yang mengidentifikasi komitmen pemerintah dan TKS sebagai faktor pendukung penting dalam implementasi BPNT.

### **Struktur Birokrasi**

Struktur birokrasi implementasi BPNT di Kelurahan Lamatti Rilau melibatkan koordinasi sistematis antara empat aktor utama: (1) Dinas Sosial Kabupaten Sinjai sebagai koordinator utama yang bertanggung jawab atas pengelolaan data SIKS-NG, pemantauan program, dan pelaporan ke pemerintah pusat; (2) Pendamping TKSK Kecamatan sebagai jembatan antara kabupaten dan kelurahan dalam pendampingan dan koordinasi lapangan; (3) Kelurahan sebagai fasilitator distribusi dan komunikasi langsung dengan KPM; serta (4) Bank HIMBARA (BRI/Mandiri) sebagai pengelola akun elektronik dan penyalur KKS kepada KPM.

Penggunaan grup WhatsApp, laporan online, dan website khusus sebagai sarana koordinasi mempercepat arus informasi dan meningkatkan transparansi antarinstansi. SOP yang jelas mengatur alur kerja masing-masing pihak, dari pendataan awal hingga distribusi bantuan dan pelaporan pasca-penyaluran. Bapak Muhibbuddin, S.E. dari Dinas Sosial menjelaskan bahwa setiap pihak memiliki peran dan tugasnya masing-masing yang telah terdefinisi dengan baik, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Kejelasan pembagian tugas ini menghasilkan koordinasi yang efektif dan penyaluran yang tertib.

Ringkasan temuan dari keempat variabel model Edwards III disajikan pada Tabel 3.

**Tabel 3.** Ringkasan Temuan Implementasi BPNT Berdasarkan Model Edwards III.

| No | Variabel           | Temuan Penelitian                                                                                                                                                                         |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Komunikasi         | Efektif melalui dua jalur: struktural (RT/RW) dan digital (WhatsApp). Informasi mengalir konsisten dari Dinas Sosial → Kelurahan → RT/RW → KPM. Kendala: KPM lansia tidak menggunakan HP. |
| 2  | Sumber Daya        | SDM memadai: 1 operator berkualifikasi S2 dan 1 pendamping TKSK berdasarkan SK Dirjen. Didukung pelatihan teknis provinsi dan evaluasi rutin.                                             |
| 3  | Disposisi          | Sangat positif: komitmen tinggi lurah, RT/RW, dan pendamping TKSK dalam seluruh tahapan. Didukung keterlibatan aktif tokoh masyarakat.                                                    |
| 4  | Struktur Birokrasi | Terkoordinasi baik: pembagian peran jelas antara Dinas Sosial, TKSK, Kelurahan, dan Bank HIMBARA. Didukung sistem pelaporan digital dan website khusus.                                   |

### **Aspek-Aspek Implementasi Program BPNT**

#### ***Ketepatan Sasaran Penerima***

Proses penetapan sasaran penerima BPNT di Kelurahan Lamatti Rilau dilakukan secara berjenjang dan sistematis. Tahap pertama adalah pengumpulan dokumen identitas (KTP dan KK) oleh RT/RW dari masyarakat yang dianggap masuk kategori kurang mampu. Tahap kedua adalah verifikasi oleh pihak kelurahan untuk memastikan kebenarannya. Tahap ketiga adalah input data ke aplikasi SIKS-NG oleh Dinas Sosial Kabupaten. Tahap keempat adalah validasi dan penetapan final oleh Kementerian Sosial berdasarkan sistem perankingan nasional. Lurah Lamatti Rilau menegaskan bahwa pihak kelurahan selalu melakukan pendataan ulang untuk memastikan bantuan tidak salah sasaran.

Tantangan utama adalah tingginya antusiasme masyarakat yang merasa berhak menerima bantuan, namun tidak semuanya dapat diakomodasi karena keterbatasan kuota dari pemerintah pusat. Pihak kelurahan menghadapi tekanan sosial ketika harus menjelaskan kepada warga bahwa kewenangan penetapan akhir ada di pemerintah pusat. Distribusi penerima pada tahun 2025 disajikan pada Tabel 4.

**Tabel 4.** Distribusi Penerima BPNT per Lingkungan Tahun 2025.

| No.          | Nama Lingkungan     | Jumlah KPM (2025) |
|--------------|---------------------|-------------------|
| 1            | Polewali            | 22 KK             |
| 2            | Onrong Datu         | 24 KK             |
| 3            | Leppakomai          | 52 KK             |
| 4            | Cenning             | 37 KK             |
| <b>Total</b> | <b>4 Lingkungan</b> | <b>135 KK</b>     |

Lingkungan Leppakomai menerima porsi terbesar (38,5%) yang proporsional dengan jumlah penduduk dan KK terbanyak. Secara keseluruhan, ketepatan sasaran dinilai baik dari sisi proses dan mekanisme.

Temuan ini kontras dengan permasalahan ketidaktepatan sasaran yang ditemukan Rachman et al. (2018) di Makassar dan Kawung et al. (2020) di Manado, menunjukkan perbaikan signifikan dalam pengelolaan data KPM.

### ***Mekanisme Penyaluran Bantuan***

Sistem penyaluran BPNT di Kelurahan Lamatti Rilau mengalami adaptasi signifikan dari desain nasional. Program awalnya dirancang agar KPM menggunakan KKS di e-warong yang ditunjuk untuk berbelanja beras dan telur. Namun karena banyak KPM—terutama lansia—mengalami kesulitan menggunakan kartu elektronik dan mengakses e-warong, sistem dimodifikasi menjadi pengambilan bantuan langsung di kantor kelurahan menggunakan KTP sebagai identitas. Ibu Rosdiana, KPM dari Lingkungan Polewali, menyatakan: *"Penyaluran bantuan beras yang dulunya diambil di salah satu toko yang sudah ditentukan dengan kartu KKS, tapi sudah beberapa tahun ini tidak pernah lagi ambil beras di sana. Ambil beras sudah di kelurahan dengan menggunakan KTP ketika sudah ada undangan dari kelurahan."* (Wawancara, 13 Juli 2025)

Adaptasi ini mencerminkan responsivitas pemerintah daerah terhadap kondisi dan kebutuhan riil masyarakat—sebuah prinsip penting dalam implementasi kebijakan yang efektif. Meskipun terdapat penyesuaian dari desain program nasional, perubahan ini justru meningkatkan aksesibilitas dan tingkat partisipasi KPM. Ibu Intang dari Lingkungan Onrong Datu yang telah menerima bantuan selama 5 tahun menyatakan bahwa perubahan mekanisme pengambilan di kelurahan dengan KTP memudahkan dirinya sebagai lansia yang tinggal seorang diri. Mekanisme penyaluran secara keseluruhan dinilai efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

### ***Kualitas Bahan Pangan***

Kualitas bahan pangan yang disalurkan merupakan salah satu indikator terpenting dalam menilai keberhasilan BPNT. Hasil wawancara dengan empat KPM dari masing-masing lingkungan menunjukkan konsistensi penilaian positif terhadap kualitas beras yang diterima. Tidak ada keluhan mengenai beras kotor, berketu, berbau, berwarna kuning, atau pecah-pecah. Ibu Marwa dari Lingkungan Leppakomai yang telah menerima bantuan selama beberapa tahun menyatakan bahwa kualitas beras selalu bagus, bersih, dan belum pernah mendapatkan beras yang tidak layak konsumsi. Operator BPNT Kelurahan, Bapak Awaluddin, S.IP., M.M., mengonfirmasi bahwa tidak pernah ada laporan masyarakat terkait beras rusak atau tidak layak konsumsi selama beliau bertugas.

Konsistensi kualitas ini merupakan capaian yang patut diapresiasi, mengingat permasalahan kualitas bahan pangan merupakan keluhan yang cukup umum di daerah lain—misalnya beras berkutu dan kualitas rendah yang ditemukan Kawung et al. (2020) di Kota Manado. Kualitas bahan pangan yang terjaga baik berkontribusi langsung pada kepuasan KPM dan kepercayaan masyarakat terhadap program.

### ***Monitoring dan Evaluasi Program***

Monitoring dan evaluasi (monev) implementasi BPNT di Kelurahan Lamatti Rilau dilaksanakan secara berlapis. Di tingkat kelurahan, operator BPNT melakukan pencatatan data penyaluran secara berkala dan melaporkannya kepada Dinas Sosial Kabupaten. Di tingkat kecamatan, pendamping TKSK melakukan verifikasi lapangan dan berkoordinasi dengan Camat terkait perkembangan program. Di tingkat kabupaten, Dinas Sosial memantau realisasi program melalui sistem informasi SIKS-NG dan melakukan bimbingan teknis berkala.

Sistem pelaporan berbasis digital memungkinkan pemantauan yang lebih akurat dan real-time dibandingkan sistem manual. Ketika ditemukan ketidaksesuaian data atau permasalahan lapangan, pihak-pihak terkait dapat segera berkoordinasi melalui grup WhatsApp untuk mencari solusi. Meskipun demikian, masih terdapat kelemahan dalam dokumentasi tertulis di tingkat kelurahan yang perlu diperbaiki untuk mendukung akuntabilitas jangka panjang.

### **Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi**

#### ***Faktor Pendukung***

Terdapat tiga faktor utama yang mendukung keberhasilan implementasi BPNT di Kelurahan Lamatti Rilau. Pertama, Dukungan Pemerintah Daerah. Pemerintah Kabupaten Sinjai menunjukkan komitmen institusional yang kuat terhadap BPNT melalui dukungan kebijakan yang responsif, alokasi anggaran untuk operasional program, pengembangan kapasitas SDM secara berkelanjutan melalui pelatihan teknis, serta komitmen untuk terus memperbaiki akurasi data DTKS. Pengolah Data Kabupaten menegaskan bahwa dukungan ini terwujud dalam kebijakan yang memperlancar proses penyaluran dan penyediaan infrastruktur teknologi yang memadai.

Kedua, Partisipasi Aktif Masyarakat. Tingginya antusiasme KPM dalam mengikuti setiap tahapan program—dari pendataan, verifikasi, hingga pengambilan bantuan—mencerminkan penerimaan yang baik terhadap program. Lebih dari sekadar penerima pasif, sebagian KPM juga aktif memberikan masukan kepada kelurahan dan pendamping sosial terkait perbaikan pelaksanaan. Komunikasi dua arah yang sehat ini menjadi modal sosial penting dalam keberlanjutan program.

Ketiga, Koordinasi Antar-Stakeholder yang Solid. Koordinasi berkala antara kelurahan, Dinas Sosial, pendamping TKSK, dan Bank HIMBARA menciptakan sistem implementasi yang terpadu. Lurah Lamatti Rilau menegaskan bahwa koordinasi ini dilakukan tidak secara sporadis, melainkan secara sistematis, sehingga proses penyaluran bantuan dapat dipantau dan dievaluasi secara berkelanjutan. Ketika terdapat kendala, semua pihak dapat segera berkoordinasi untuk mencari solusi bersama.

### ***Faktor Penghambat***

Hambatan utama yang ditemukan dalam implementasi BPNT di Kelurahan Lamatti Rilau adalah keterbatasan akses dan kemampuan teknologi pada sebagian KPM, khususnya kelompok lanjut usia dan keluarga dengan kondisi ekonomi sangat terbatas. Banyak di antara mereka tidak memiliki smartphone atau tidak mampu mengoperasikannya secara mandiri. Kondisi ini menyebabkan keterlambatan penerimaan informasi jadwal penyaluran dan perubahan kebijakan. Lurah Lamatti Rilau menyatakan: *"Masih banyak masyarakat, khususnya lansia atau keluarga kurang mampu yang belum memiliki atau tidak bisa mengoperasikan handphone berbasis android. Akibatnya informasi terkait jadwal penyaluran atau perubahan kebijakan tidak dapat diterima secara tepat waktu."* (Wawancara, 10 Juli 2025)

Hambatan kedua adalah keterbatasan kuota penerima dari pemerintah pusat yang tidak dapat mengakomodasi seluruh masyarakat yang secara kondisi ekonomi seharusnya berhak menerima bantuan. Hal ini menimbulkan ekspektasi masyarakat yang tidak selalu dapat dipenuhi dan membutuhkan penjelasan yang sensitif dari pihak kelurahan. Hambatan ketiga adalah ketergantungan pada satu jalur komunikasi (WhatsApp) yang tidak menjangkau KPM tanpa smartphone, menciptakan kesenjangan informasi yang perlu diatasi melalui mekanisme alternatif.

### **Upaya Penanganan Hambatan**

Untuk mengatasi hambatan keterbatasan teknologi, pemerintah kelurahan bersama pendamping TKSK menempuh beberapa strategi adaptif. Strategi pertama adalah memperkuat peran RT/RW dan tokoh masyarakat sebagai mediator informasi langsung (door-to-door) kepada KPM yang tidak memiliki akses digital. Dengan demikian, informasi tentang jadwal penyaluran, perubahan aturan, dan prosedur pengambilan bantuan tetap dapat disampaikan secara personal dan mudah dipahami, meskipun KPM tidak memiliki smartphone. Strategi kedua adalah mengoptimalkan grup WhatsApp aparat kelurahan (bukan grup KPM) sebagai pusat informasi, di mana RT/RW menjadi penyambung informasi terakhir ke masyarakat.

Dengan cara ini, informasi dapat tersebar lebih cepat di level aparat sebelum diteruskan secara lisan kepada KPM. Strategi ketiga adalah adaptasi mekanisme penyaluran dari penggunaan KKS di e-warong menjadi pengambilan langsung di kelurahan dengan KTP, yang secara signifikan mengurangi hambatan teknologi bagi KPM lansia.

Keberhasilan ketiga strategi ini dibuktikan dengan tingkat partisipasi KPM yang hampir 100% pada setiap siklus penyaluran dan tidak adanya keluhan dari KPM yang tidak mendapatkan informasi tepat waktu. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak bersikap kaku terhadap hambatan yang ada, melainkan secara proaktif mencari solusi yang sesuai dengan kondisi lokal masyarakat.

### **Dampak Program terhadap Kesejahteraan Masyarakat**

Program BPNT di Kelurahan Lamatti Rilau memberikan dampak positif yang terukur pada tiga dimensi kesejahteraan. Pertama, dampak ekonomi: bantuan beras 10 kg per bulan (dengan nilai sekitar Rp 110.000 yang dicairkan setiap dua bulan sekali) memungkinkan penghematan anggaran belanja keluarga yang kemudian dapat dialokasikan untuk pendidikan anak, kebutuhan kesehatan, atau pemenuhan kebutuhan rumah tangga lainnya. Ibu Marwa dari Lingkungan Leppakomai menyatakan: *"Dengan adanya bantuan beras ini, saya bisa menghemat uang belanja bulanan untuk dialokasikan ke kebutuhan lain seperti biaya sekolah anak atau kesehatan keluarga."* (Wawancara, 13 Juli 2025)

Kedua, dampak ketahanan pangan: dengan jaminan akses terhadap bahan pangan pokok (beras) secara rutin setiap bulan, keluarga penerima memiliki kepastian konsumsi yang mengurangi kecemasan terkait ketersediaan pangan. Ibu Marwah dari Lingkungan Cenning yang telah menerima bantuan selama 5 tahun mengungkapkan bahwa bantuan beras yang diterima selalu cukup bahkan kadang masih ada sisa, memberikan rasa aman dan tenang dalam mengatur kebutuhan makan keluarga.

Ketiga, dampak sosial: proses pengambilan bantuan yang dilakukan bersama di kelurahan menjadi momentum interaksi sosial antar warga dan penguatan kohesi komunitas. Program ini juga berkontribusi mengurangi beban psikologis keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar pangan. Ibu Intang dari Lingkungan Onrong Datu yang tinggal seorang diri mengakui bahwa bantuan BPNT selama kurang lebih 5 tahun sangat membantunya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

## 5. KESIMPULAN

Implementasi kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Lamatti Rilau Kecamatan Sinjai Utara telah berjalan efektif berdasarkan keempat variabel model implementasi George C. Edwards III. Komunikasi berlangsung efektif melalui dua jalur yang saling melengkapi—struktural (RT/RW) dan digital (WhatsApp)—memastikan informasi tersampaikan secara konsisten dari Dinas Sosial hingga KPM. Sumber daya manusia yang ada memadai dan berkualifikasi sesuai, dengan dukungan pelatihan teknis berkelanjutan dari provinsi. Disposisi para pelaksana sangat positif dengan komitmen tinggi di semua tingkatan, dari lurah hingga RT/RW. Struktur birokrasi berjalan dengan pembagian tugas yang jelas dan koordinasi antarinstansi yang terorganisir dengan baik.

Tiga faktor utama mendukung keberhasilan program: komitmen penuh pemerintah daerah Kabupaten Sinjai, partisipasi aktif masyarakat yang tidak sekadar menerima bantuan tetapi juga memberikan masukan konstruktif, serta koordinasi berkala dan sistematis antar-stakeholder (kelurahan, Dinas Sosial, TKSK, dan Bank HIMBARA). Hambatan utama berupa keterbatasan akses teknologi pada KPM lansia telah berhasil diatasi melalui penguatan peran RT/RW dan tokoh masyarakat sebagai mediator informasi, serta adaptasi mekanisme penyaluran dari KKS di e-warong menjadi pengambilan langsung di kelurahan menggunakan KTP. Program terbukti memberikan dampak positif nyata berupa pengurangan beban ekonomi, peningkatan ketahanan pangan, dan dampak sosial positif bagi 135 KPM.

Berdasarkan temuan penelitian, rekomendasi yang diajukan meliputi: (1) peningkatan jumlah pendamping TKSK agar setiap kelurahan mendapat pendampingan optimal dan tidak bergantung pada satu personel; (2) pengembangan metode sosialisasi berbasis komunitas yang inklusif—termasuk sosialisasi door-to-door dan penggunaan media visual—bagi KPM dengan keterbatasan teknologi; serta (3) penguatan sistem dokumentasi dan pencatatan data program di tingkat kelurahan untuk mendukung akuntabilitas, monitoring, dan evaluasi yang lebih akurat dan komprehensif.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kelurahan Lamatti Rilau, Dinas Sosial Kabupaten Sinjai, seluruh informan penelitian yang telah meluangkan waktu dan memberikan informasi berharga, serta Universitas Muhammadiyah Sinjai yang telah mendukung terlaksananya penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Assa, A. F., & Dach, A. (2023). Pengaruh Disiplin Kerja, Gaya Kepemimpinan, dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan. *Komitmen: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 4(1), 167–176. <https://doi.org/10.15575/jim.v4i1.23740>
- Aziz, A., & Humaizi. (2013). Implementasi Kebijakan Publik Studi Tentang Kegiatan Pusat Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 3(1), 1–15.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sinjai. (2024). Profil Kemiskinan Kabupaten Sinjai Maret 2024. BPS Kabupaten Sinjai.
- Dunn, W. N. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik (edisi ke-2). Gadjah Mada University Press.
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press.
- Farid Yusuf Nur Achmad. (2023). Penilaian Performa Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Berbasis Metode Evaluasi Efektivitas dan Efisiensi. *Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, 9, 43–54.
- Fauzi, H. M., Fitriyah, N. S., & Hidayat, E. R. (2023). Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Wringin Anom Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(1), 429–440.
- Kawung, A. M., Lumolos, J., & Sampe, S. (2020). Evaluasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Kepada Keluarga Penerima Manfaat di Kelurahan Mahakeret Barat dan Kelurahan Mahakeret Timur Kecamatan Wenang Kota Manado. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 4(4), 1–9.
- Kementerian Lintas Sektor. (2017). *Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai*. Kementerian Sosial RI.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Mulyadi, A. (2019). Implementasi Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kelurahan Cikondang Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi. *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*, 1–6.
- Nirmawati, Husaini, M., & Hasbiyah, S. (2025). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Kota Raden Hulu Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Jurnal Administrasi Negara*, 6(2), 839–849.
- Nurfurqon, A. (2020). Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penanganan Covid-19: Perspektif Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan*, 23(01), 13–23. <https://doi.org/10.24123/yustika.v23i01.2864>
- Pamungkas, S. H. A., Daffaakbar, M. A., & Nurrizky, A. M. (2022). Analisis Tata Kelola Kebijakan Sosial Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia Berdasarkan Perspektif Adaptive Governance. *Journal of Social Development Studies*, 3(2), 87–105.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.
- Pramono, J. (2020). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. UNISRI Press.



- Purba, G. F. B., Sinulingga, D. M. C., Togatorop, J., & Harahap, L. M. (2025). Peran Program Bantuan Sosial dalam Pengentasan Kemiskinan: Evaluasi dari Berbagai Penelitian. *Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen*, 4(1), 108–117.
- Rachman, B., Agustian, A., & Wahyudi, N. (2018). Efektivitas dan Perspektif Pelaksanaan Program Beras Sejahtera (Rastra) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). *Analisis Kebijakan Pertanian*, 16(1), 1–18. <https://doi.org/10.21082/akp.v16n1.2018.1-18>
- Rini Saputri, Dewi Indriani, & Fauziah Ramdani. (2023). Pemanfaatan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Perspektif Maqāṣid Syariah. *Al-Qiblah: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, 2(4), 479–494.
- Sholih Muadi, MH, I., & Sofwani, A. (2016). Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik. *JRP (Jurnal Review Politik)*, 6(2), 195–224.
- Syamsuddin, & Jusniaty. (2021). Penerapan Bantuan Pangan Non Tunai di Kelurahan Samaenre Kecamatan Sinjai Tengah. *Al Qisthi Jurnal Sosial dan Politik*, 11(1), 32–38. <https://doi.org/10.47030/aq.v11i1.90>
- Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. (2020). Pedoman Umum Program Sembako Perubahan I Tahun 2020. Kemenko PMK.
- Yunus, E. Y. (2019). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo. *Reformasi*, 9(2), 138. <https://doi.org/10.33366/rfr.v9i2.1454>
- Zellatifanny, C. M., & Mudjiyanto, B. (2018). Tipe Penelitian Deskripsi dalam Ilmu Komunikasi. *Diakom: Jurnal Media dan Komunikasi*, 1(2), 83–90. <https://doi.org/10.17933/diakom.v1i2.20>